



Giwangan Tak Layani Bus Jabodetabek

■ Perbatasan DIY Mulai Dijaga Penuh

Hari ini (kemarin) juga sudah tidak ada pemberangkatan ke Jabodetabek. Kemarin (Rabu) masih ada, tapi hanya dua penumpang.

BEKTI ZUNANTA
Kepala UPT
Terminal Giwangan

YOGYA, TRIBUN - Terminal Giwangan, Yogyakarta mulai memperkuat pengawasan terhadap bus yang masuk. Khususnya bus yang berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kepala UPT Terminal Giwangan, Bakti Zunanta mengatakan, saat ini penumpang bus sudah semakin sedikit.

Dengan adanya pelarangan mudik pun tidak berpengaruh pada membeludaknya penumpang di terminal. "Penumpang masih sepi seperti biasa. Kemarin (Rabu) ada 69 penumpang, sekarang (kemarin) ada 47 penumpang. Masih tetap sedikit," katanya, Kamis (23/4).

Dengan adanya pelarangan mudik, Terminal Giwangan juga tidak membolehkan penumpang bus dari Jabodetabek masuk. Mulai kemarin pun Terminal Giwangan sudah tidak melayani keberangkatan menuju Jabodetabek.

"Kalau bus masuk dari zona merah kan sekarang sudah ada diperiksa oleh tim. Kendaraan dari zona merah dilarang di perbatasan-perbatasan. Sudah di-screening di sana, dan disuruh pu-

● ke halaman 7

Batasi Perjalanan

- Terminal Giwangan sudah tak lagi melayani bus menuju dari dan ke Jabodetabek. Moda transportasi umum udara, darat, dan laut pun ditutup mulai pukul 12.00.
- Hal tersebut dikeluarkan bagi tamu negara, pejabat negara, dan kepentingan darurat nasional/internasional.
- PT AP-1 menyediakan kantong plastik yang dapat menampung 60 penumpang dari total 157 maskapai di YIA, hanya 20 hingga 30 saja yang diizinkan berangkat.

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Giwangan Tak

• Sambungan Hal 1

tar balik," ucap Bektii. "Hari ini (kemarin) juga sudah tidak ada pemberangkatan ke Jabodetabek. Kemarin (Rabu) masih ada, tapi hanya dua penumpang," sambungnya.

Terminal Giwangan saat ini bertindak sebagai filter, bekeja sama dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta. Terminal melakukan pengecekan, dimulai dari surat sehat, cek suhu tubuh, dan lain-lain. Jika penumpang bus tidak bersurat sehat dan memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat celsius, pihaknya langsung berkoordinasi dengan tim gugus tugas.

Terpisah, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, berharap masyarakat mematuhi peraturan untuk tidak mudik. Menurut dia, saat ini mudik bukanlah pilihan yang tepat, sebab tidak bisa berkumpul dengan keluarga.

"Nanti kalau mudik, dia harus isolasi dulu 14 hari. Setelah itu kalau dia kembali ke daerahnya lagi, harus isolasi lagi 14 hari. Kan malah satu bulan untuk isolasi. Harapannya ini (larang mudik) bisa ditaati oleh semua warga, ini untuk kebaikan bersama," ujar Wakil Wali Kota Yogya-

karta ini.

Sementara itu, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menjelaskan hasil *teleconference* bersama Gubernur se-Jawa, Bali, Lampung serta jajaran Kementerian Perhubungan, dan juga Biro Hukum yang dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan. Substansi yang dibahas terkait regulasi mudik, di mana secara formul kepres tersebut belum ditandatangani meski draf sudah ada.

"Secara umum DIY menyipkan tiga pos di tiga pintu utama berbatasan dengan Purworejo, Muntilan, dan Prambanan. Secara teknis Pak Tavip (Kepala Dishub DIY) akan menjelaskan," bebernya, di Gedung Pracimanasana Kompleks Keparthan, Kamis (23/4).

Tavip Agus Rayanto mengatakan ada beberapa poin yang dibahas. Khusus sanksi, termasuk diminta balik kanan dan sebagainya, ditekan Dirjen Perhubungan Darat itu hanya bisa diberikan kepada daerah yang sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Artinya untuk Yogya, masih melaksanakan pendekatan persuasif walau kita tetap memperketat protokol kesehatan. Selama ini penjaan satu *shift*, mulai besok (Jumat) kita sudah tiga *shift*,"

jelasnya.

Tavip menekankan, tidak ada istilah penutupan jalan akses masuk DIY, melainkan pemeriksaan penerapan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan karena kendaraan angkutan barang logistik dipastikan harus tetap jalan. Dia menegaskan, perintah penutupan jalan adalah istilah yang tidak pas. Pemda DIY melakukan klarifikasi, bukan penutupan melainkan pemeriksaan protap secara tepat.

"Penumpang bus dibatasi, harus pakai masker, (memberi jarak untuk) tempat duduk, lebih ke aspek itu. *Tracking* bagaimana untuk dilakukan, arahnya begitu. Kemarin ditanya wartawan, memang ada aspirasi, *mbok* DIY sama. Tapi problem hukumnya kita belum PSBB sampai hari ini (kemarin). Bagi yang belum PSBB, belum ada sanksi," paparnya.

Tavip mengungkapkan, bagi daerah yang sudah PSBB, sudah diterapkan sanksi. Bisa denda, diminta balik kanan, ditilang dan sebagainya, sebagaimana diterapkan di DKI Jakarta. "Ketika menkes (menteri kesehatan) memberikan izin pada gubernur, di situlah sudah diatur siapa yang boleh buka siapa yang enggak boleh melanggar. DIY belum PSBB karena ada 4 aspek untuk mengajukan PSBB," ucapnya.

Tavip menjelaskan Pemda DIY masih menunggu regulasi tersebut dan mencermatinya, apakah mengatur daerah yang khusus PSBB atau juga mengatur daerah lain yang belum PSBB. Ketika regulasi atau kepresnya tidak mengamanatkan pada daerah yang belum PSBB, maka yang dilakukan Pemda DIY sesuai Permenhub nomor 18/2020.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kulon Progo, Bowo Pristiyanto mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemetaan mengenai Jalur-Jalur alternatif yang berada di wilayah terbarat di DIY. Ada beberapa jalur alternatif yang berpotensi digunakan oleh para pemudik yang ingin masuk ke DIY.

"Untuk yang jalur selatan kan sudah difokuskan di Kapanewon Temon, itu sebagai pintu masuk utama. Sedangkan saat ini juga masih terdapat beberapa titik yang dapat menjadi pintu masuk lainnya yang berada di Kulon Progo bagian utara," jelasnya.

Pintu masuk tersebut yakni di Wilayah Jagalan, Kapanewon Kalibawang yang berbatasan langsung dengan Magelang dan di Kapanewon Samigaluh yang menghubungkan Kulon Progo dengan Purworejo. (maw/kur/abe)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005